

**KEPUTUSAN WALIKOTA BONTANG**  
**NOMOR 060.4/219.1/Org.3. TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH**  
**KOTA BONTANG TAHUN 2016-2021**

**WALIKOTA BONTANG,**

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka mengukur tingkat keberhasilan kinerja dilingkungan Pemerintah Kota Bontang, perlu menetapkan indikator kinerja utama;
- b. bahwa untuk melaksanakan maksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Walikota Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3839) Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4641);
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.

#### **MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan :**

- KESATU : Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kota Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;
- KEDUA : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud diktum KESATU merupakan acuan untuk menetapkan rencana kinerja tahunan, rencana kerja dan anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pemerintah Kota Bontang;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Bontang  
pada tanggal 23 September 2016

**WALIKOTA BONTANG,**

A handwritten signature in blue ink, consisting of a series of loops and a long horizontal stroke extending to the right.

**NENI MOERNIAENI**

Lampiran : Keputusan Walikota Bontang  
 Nomor : 060.4/ 219.1/Org.3. Tahun 2016  
 Tanggal : 23 SEPTEMBER 2016  
 Tentang : **PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KOTA BONTANG PERIODE 2016-2021**

1. Nama Unit Organisasi : Pemerintah Kota Bontang
2. Tugas :
  - a. Memimpin pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi wewenang Daerah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan kebijakan yang ditetapkan bersama DPRD;
  - b. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
  - c. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang RPJMD dan rancangan Perda tentang RPJMD kepada DPRD untuk dibahas bersama DPRD, serta menyusun dan menetapkan RKPD;
  - d. Menyusun dan mengajukan rancangan Perda tentang APBD , rancangan perda tentang perubahan APBD, dan rangan Perda tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD untuk dibahas bersama;
  - e. Mewakili daerahnya di dalam dan di luar pengadilan dan dapat menunjuk kuasa hukum untuk mewakilinya sesuai dengan ketentuan peraturan dan perundang-undangan;
  - f. Mengusulkan pengangkatan wakil kepala daerah;
  - g. Melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundangng-undangan.

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Alasan Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
1.	Meningkatnya kualitas Pendidikan untuk semua	1	Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	- Angka harapan hidup pada waktu lahir - Angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah - Kemampuan daya beli	Dinas Kesehatan dan Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
		2	Rata-rata lama sekolah penduduk usia 15 tahun ke atas	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki, dan pendidikan yang ditamatkan	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
		3	Harapan Lama Sekolah (HLS)	Perbandingan antara jumlah penduduk usia tertentu yang bersekolah pada thn tertentu dengan jumlah penduduk usia tertentu pada tahun tertentu	Dinas Pendidikan	Profil Pendidikan Kota Bontang / BPS
2.	Meningkatnya kualitas Kesehatan untuk semua	4	Angka Kematian Bayi (rasio)	(Jumlah kematian bayi dalam setahun : Jumlah kelahiran hidup) x 1000	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan
		5	Angka kematian ibu	(Jumlah kematian ibu dalam setahun : Jumlah	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama	Penjelasan/Alasan Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data	
			per 100.000 kelahiran (rasio)	kelahiran hidup) x 100.000		
		6	Prevalensi Balita Gizi kurang (persen)	(Jumlah Balita gizi kurang : jumlah balita) x 100	Dinas Kesehatan	Profil Kesehatan
3	Meningkatnya kesejahteraan kehidupan sosial	7	Tingkat Kemiskinan (%)	(Jumlah KK miskin : Jumlah KK) x 100%	Dinas Sosial dan tenaga kerja	Disosnaker dan BPS
		8	Tingkat Pengangguran (%)	(Penduduk yang bekerja : penduduk yang tidak bekerja) x 100%	Dinas Sosial dan tenaga kerja	Disosnaker dan BPS
4	Terwujudnya Penyelenggaraan Pemerintahan yang Transparan, Akuntabel dan Partisipatif	9	Predikat Akuntabilitas Kinerja Pemerintah	Nilai evaluasi laporan akuntabilitas Kinerja Pemerintah	SETDA	Laporan Hasil Evaluasi LKIP
		10	Nilai LPPD	Nilai evaluasi LPPD	SETDA	Laporan Hasil Evaluasi LPPD
		11	Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	SETDA, Perangkat Daerah dan Unit Kerja	Laporan hasil SKM
		12	Indeks Reformasi Birokrasi	Nilai komponen 8 area perubahan	SETDA	Laporan hasil IRB
		13	Indeks Kota Cerdas Indonesia	Nilai Indeks Kota Cerdas	Dinas terkait	Laporan hasil Indeks Kota Cerdas
5	Meningkatnya cakupan pengelolaan sanitasi	14	Cakupan pelayanan air limbah domestik	(Jumlah limbah yang dikelola : Total limbah) x 100%	DKP	Laporan pelayanan air limbah domestik
		15	Cakupan Penanganan sampah	Jumlah sampah yang tertangani : Jumlah produksi sampah x100%	DKP	Laporan volume sampah masuk TPA
6	Meningkatnya Kualitas Lingkungan Permukiman	16	Kawasan perumahan dan Permukiman kumuh	(Luas wilayah pemukiman kumuh : luas wilayah) x 100%	Dinas PU/DPKP2	PU
7	Menekan laju pertumbuhan emisi Gas Rumah Kaca	17	Mempertahankan laju pertumbuhan emisi	Menggunakan kalkulator IPCC	BLH, Dinas Perhubungan	Laporan hasil pemantauan kandungan emisi
8	Meningkatnya akses pelayanan air minum	18	Cakupan pelayanan air minum	(Jumlah rumah tangga pengguna air bersih : jumlah seluruh rumah tangga) x 100%	Dinas PU	Laporan cakupan pelayanan air minum yang dapat dilayani
9	Terselesainya	19	Luas wilayah tergenang	(Jumlah wilayah tergenang : Jumlah Luas Wilayah) x	Dinas PU	Laporan presentasi

No.	Sasaran Kinerja	Indikator Kinerja Utama		Penjelasan/Alasan Perhitungan	Penanggung Jawab	Sumber Data
	permasalahan banjir			100%		wilayah tergenang
10	Meningkatnya pertumbuhan ekonomi non migas	20	Pertumbuhan PDRB Non Migas	Hasil dari penetapan BPS	Disperindagkop/ Bappeda	Laporan PDRB
11	Meningkatnya kegiatan perekonomian berbasis sektor maritim	21	Kontribusi sektor ekonomi maritim terhadap PDRB non migas	Hasil dari penetapan BPS	Disperindagkop/ Bappeda/DPKP	Laporan PDRB
12	Tersedianya infrastruktur kota yang memadai untuk mendukung perkembangan ekonomi kota	22	Panjang jalan kondisi baik	(Jumlah panjang jln dalam kondisi baik : jumlah jalan keseluruhan) x 100%	Dinas PU	Laporan monitoring sarana prasarana dasar
		23	Jaringan gas rumah tangga	Jumlah kelurahan yang tersambung jargas	Disperindagkop	Laporan pelayanan instalasi Gas RT.

**WALIKOTA BONTANG,**

**NENI MOERNIAENI**